

LAPORAN KEUANGAN

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2024**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Pimpinan Universitas	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN UNIVERSITAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA**

Nomor : B/114/UN31.PPKU/KU.03.03/2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Yunus, S.S., M.A.
Alamat Kantor : Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Nomor Telepon : (021) 7490941
Jabatan : Rektor

Dalam hal ini bertindak selaku Manajemen Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.
2. Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2025
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka



Dr. Mohammad Yunus, S.S., M.A.
Rektor PTNBH Universitas Terbuka

Nomor: 00388/2.0459/AU.1/11/0469-2/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Majelis Wali Amanat dan Rektor
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka ("Universitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Universitas tanggal 31 Desember 2024, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Universitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Universitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Universitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Universitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Universitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Universitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Universitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Heliantono & Rekan

HELIANTONO & REKAN
Parker Russell International
Registered Public Accountants



Dr. Heliantono

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0469

20 Maret 2025

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2e, 4	2.168.706.750.683	2.204.335.565.075
Piutang Usaha	2d, 2f, 5	119.527.421	6.022.827.459
Persediaan	2g, 8	112.576.658.412	215.758.207.833
Biaya Dibayar di Muka	2h, 6	1.038.846.850	598.756.813
Uang Muka	2h, 7	346.169.091	640.779.821
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	9	970.010.304	1.681.917.862
Total Aset Lancar		<u>2.283.757.962.761</u>	<u>2.429.038.054.863</u>
Aset Tidak Lancar			
Investasi Jangka Panjang	10	150.000.000.000	-
Aset Tetap	2i, 11	1.083.207.111.975	948.076.755.137
Aset Lainnya	2j, 12	826.462.621	1.631.422.283
Total Aset Tidak Lancar		<u>1.234.033.574.596</u>	<u>949.708.177.420</u>
TOTAL ASET		<u>3.517.791.537.357</u>	<u>3.378.746.232.283</u>
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	2k, 13	107.403.198.789	89.780.721.940
Utang Pajak	2o, 22a	6.086.400.869	454.295.836
Biaya yang Masih Harus Dibayar	2k, 14	1.385.545.849	1.371.249.531
Pendapatan Diterima di Muka	2k, 15	27.997.604.766	26.622.118.194
Utang Jangka Pendek Lainnya	2l, 16	2.743.339.085	937.539.770
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>145.616.089.358</u>	<u>119.165.925.271</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Imbalan Pasca Kerja	17	1.391.419.504	-
Total Liabilitas Jangka Panjang		<u>1.391.419.504</u>	<u>-</u>
TOTAL LIABILITAS		<u>147.007.508.862</u>	<u>119.165.925.271</u>
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan	2m, 18a	5.359.186.662.389	5.268.992.540.637
Dengan Pembatasan	2m, 18b	<u>(1.988.402.633.894)</u>	<u>(2.009.412.233.625)</u>
TOTAL ASET NETO		<u>3.370.784.028.495</u>	<u>3.259.580.307.012</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>3.517.791.537.357</u>	<u>3.378.746.232.283</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
TANPA PEMBATAAN			
Pendapatan			
Layanan Akademik	2n, 19a	2.044.448.162.139	1.633.365.082.756
Layanan Non Akademik	2n, 19a	302.677.879	1.799.959.191
Unit Bisnis	2n, 19a	7.871.579.054	8.737.808.882
Bunga	2n, 19a	100.088.786.244	61.890.198.425
Investasi	2n, 19a	6.219.807.097	-
Hibah	2n, 19a	3.298.072.000	3.359.304.258
Total Pendapatan		2.162.229.084.413	1.709.152.353.512
Beban			
Beban Layanan	2n, 20a	1.455.521.050.606	1.189.588.502.091
Beban Administrasi dan Umum	2n, 20a	589.503.946.730	513.545.595.416
Total Beban		2.045.024.997.336	1.703.134.097.507
Pendapatan/(Beban) Lain			
Pendapatan Lainnya	19	18.264.036.042	23.508.646.118
Beban Lainnya	19	(28.141.137.646)	(734.171.243)
Total Pendapatan/(Beban) Lain		(9.877.101.604)	22.774.474.875
Surplus		107.326.985.473	28.792.730.880
DENGAN PEMBATAAN			
Pendapatan			
Bantuan Pendanaan PTNBH	2n, 17b	40.000.000.000	50.000.000.000
APBN Lainnya	2n, 17b	164.656.125.585	127.125.590.810
Total Pendapatan		204.656.125.585	177.125.590.810
Beban			
Beban Layanan	2n, 18b	100.773.082.397	83.720.523.997
Beban Administrasi dan Umum	2n, 18b	82.873.443.457	89.970.033.438
Total Beban		183.646.525.854	173.690.557.435
Surplus		21.009.599.731	3.435.033.375
KENAIKAN ASET NETO SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		128.336.585.204	32.227.764.255
Beban Pajak Penghasilan	2o, 20b	-	-
KENAIKAN ASET NETO SETELAH PAJAK PENGHASILAN		128.336.585.204	32.227.764.255
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
KENAIKAN ASET NETO SETELAH PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		128.336.585.204	32.227.764.255

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
ASET NETO TANPA PEMBATAAN		
Saldo Awal	5.268.992.540.637	5.240.199.809.757
Koreksi Tahun Berjalan	(17.132.863.721)	-
Surplus Tahun Berjalan	107.326.985.473	28.792.730.880
Aset Neto yang Dibebaskan dari Pembatasan	-	-
Saldo Akhir	<u>5.359.186.662.389</u>	<u>5.268.992.540.637</u>
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo Awal	-	-
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	-
Saldo Akhir	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>5.359.186.662.389</u>	<u>5.268.992.540.637</u>
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN		
Saldo Awal	(2.009.412.233.625)	(2.012.847.267.000)
Surplus Tahun Berjalan	21.009.599.731	3.435.033.375
Saldo Akhir	<u>(1.988.402.633.894)</u>	<u>(2.009.412.233.625)</u>
TOTAL ASET NETO	<u>3.370.784.028.495</u>	<u>3.259.580.307.012</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Layanan Akademik		2.078.265.825.678	1.636.229.614.347
Penerimaan Layanan Non-akademik		230.484.979	14.460.311.491
Penerimaan Unit Bisnis		8.308.727.503	8.855.579.007
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro		100.363.545.353	61.341.376.454
Penerimaan Bunga SBSN		6.219.807.097	-
Penerimaan Hibah		3.298.072.000	3.359.304.258
Penerimaan Lainnya		9.201.095.140	23.508.646.118
Penerimaan Bantuan Pendanaan PTNBH		40.000.000.000	50.000.000.000
Penerimaan APBN lainnya		164.829.837.472	127.125.590.810
Kas yang Dibayarkan kepada Pegawai		(668.793.065.150)	(558.025.943.535)
Pembayaran Biaya Barang dan Perlengkapan		(79.996.455.340)	(76.638.598.346)
Pemakaian Persediaan		(366.408.601.926)	(356.200.398.459)
Pembayaran Jasa		(598.948.566.947)	(541.767.885.772)
Pembayaran Biaya Pemeliharaan		(46.483.446.541)	(45.596.430.633)
Pembayaran Perjalanan Dinas		(104.462.126.136)	(100.664.286.849)
Pembayaran Biaya Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat		(47.714.568.235)	(42.374.440.166)
Pembayaran Biaya Pemasaran		(62.414.363.828)	(64.702.656.558)
Pembayaran Peningkatan SDM		(25.175.936.998)	(24.137.558.531)
Pembayaran Biaya Unit Usaha		(13.200.954.794)	(5.350.162.504)
Pembayaran Biaya Bantuan Sosial		(548.080.424)	(45.777.264)
Pembayaran Lainnya		(26.257.408.946)	(387.955.126)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk atau Diperoleh dari Aktivitas Operasi		370.313.819.957	108.988.328.742
AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian Aset Tetap		(255.758.208.099)	(294.993.276.191)
Perolehan Aset Takberwujud		(184.426.250)	-
Penempatan Investasi Jangka Panjang		(150.000.000.000)	-
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk atau Diperoleh dari Aktivitas Investasi		(405.942.634.349)	(294.993.276.191)
AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		-	-
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas		(35.628.814.392)	(186.004.947.449)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun		2.204.335.565.075	2.390.340.512.524
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun		2.168.706.750.683	2.204.335.565.075

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Universitas Terbuka ("UT" atau "Universitas") adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke 45 di Indonesia yang menerapkan sistem jarak jauh. UT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.41 tahun 1984, dan diresmikan menjadi instansi pemerintah.

Pada tahun 2022, Universitas Terbuka ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, tanggal 20 Oktober 2022.

Universitas Terbuka membuka empat program studi Sarjana (S1), yang meliputi Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Statistika. Jenis program studi lainnya, yakni program pendidikan, merupakan pengambilalihan tugas Proyek Pendidikan Guru melalui Belajar Jarak Jauh dengan kurikulum dan bahan ajar baru; demikian pula dengan program Akta V yang diambil alih dari proyek yang sudah ada. Pada saat ini, Universitas Terbuka menawarkan 43 program studi yang terdiri atas 32 program sarjana, 2 program diploma, 7 program magister, dan 2 program doktor. Semua program studi ini dinaungi di dalam empat fakultas, yakni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan SDM dalam posisi strategis dalam Pembangunan. Perkembangan lingkungan strategis eksternal ke depan diperkirakan akan tetap menempatkan Pendidikan tinggi pada posisi sentral dalam pengembangan SDM suatu bangsa.

Untuk dapat masuk ke dalam jaringan global perguruan tinggi (PT), UT harus memiliki kualitas akademik yang setara atau lebih tinggi dari anggota jaringan PT tersebut, di samping tetap mengemban mandatnya sebagai institusi Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh ("PTTJJ"). Dengan memperhatikan mandat UT saat didirikan dan tujuan ke depan yang ingin dicapai, UT menetapkan visi sebagai berikut.

"Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Berkualitas Dunia".

Misi Universitas Terbuka adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan penyelenggaraan Universitas Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
3. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

b. Susunan Pejabat dan Pimpinan Universitas

Majelis Wali Amanat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tinggi Republik 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 dan perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tinggi Republik Indonesia 84701/M/06/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027, sebagai berikut:

Ketua	: Prof. Ainun Na'im, Ph.D.
Sekretaris	: Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.
Anggota	: Prof. Brian Yulianto, Ph.D Dr. Mohamad Yunus. S.S. M.A Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si. Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls. Prof. Dr. Sugilar, M.Pd. Prof. Dr. Ginta Ginting, M.B.A Dr. Harmi Sugiarti, M.Si. Dr. Sofjan Aripin, M.Si. Prof. Dr. Sardjijo, M.Si Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.,Ph.D Taurisa Andriani, SE. Dr. (H.C) Dahlan Iskan Prof. Dr. Tjitjik Srie Tjahjandarie Jendral TNI (Purn) Dr. (H.C) H. Moeldoko, S.IP Helen Ardhana Simanjuntak

Berdasarkan SK Rektor Nomor 2465/UN31/HK.02/2022 Tentang Penetapan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022 – 2026, sebagai berikut:

Senat Akademik

Ketua	: Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.
Sekretaris	: Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si.

Pimpinan Universitas

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka Susunan Pimpinan tahun 2024 sebagai berikut:

Rektor	: Prof. Drs. Ojat Darajat. M.Bus. Ph.D
Wakil Rektor Bidang Akademik	: Dr. Mohamad Yunus. S.S. M.A
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum	: Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
Wakil Rektor Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	: Prof. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.
Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis	: Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Komite Audit

Ketua	: Dr. Muhtarom, S.E., M.M., Ak
Anggota	: Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, S.IP
	Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, S.H., L.LM

Pada tanggal 31 Desember 2024, PTNBH UT memiliki karyawan yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan sebanyak 2.195 orang (tidak diaudit).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Universitas Terbuka disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335 “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan Universitas terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jumlah aset neto disajikan berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya.

Pembatasan permanen atau terikat permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut.

Pembatasan temporer atau terikat temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tertentu yang diakui berdasarkan nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Pimpinan Universitas untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Universitas.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang berlaku efektif pada tahun 2024

Universitas telah melakukan penelaahan atas penerapan standar yang berlaku efektif pada tahun 2024 dan relevan dengan operasi Universitas.

Berikut adalah standar yang relevan dengan operasi Universitas dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan:

- Amandemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik.
- Amandemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amandemen PSAK 207: Laporan Arus Kas tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Standar yang relevan dengan operasi Universitas yang telah diterbitkan dan akan berlaku efektif setelah tahun 2024 adalah amandemen PSAK 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait Kekurangan Ketertukaran.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Universitas sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

b. Penjabaran Mata Uang Asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun yang disertakan dalam laporan keuangan Universitas diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Universitas beroperasi (“mata uang fungsional”).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Universitas. Seluruh angka dalam laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (“Rp”) penuh, kecuali dinyatakan lain.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup.

Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing secara umum diakui di dalam laporan arus kas.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

c. Instrumen Keuangan

(a) Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori pengukuran sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Universitas menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Universitas memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

Aset keuangan Universitas meliputi bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih harus diterima (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Per tanggal 31 Desember 2024, Universitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau melalui penghasilan komprehensif lain.

(b) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Universitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Universitas hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam penghasilan komprehensif.

Liabilitas keuangan Universitas meliputi utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan penghasilan komprehensif pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai biaya keuangan.

(c) Instrumen keuangan disalinghapuskan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam operasional normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Universitas atau pihak lawan.

d. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Universitas menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Universitas menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Universitas membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Universitas menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

e. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari saldo kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijaminkan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dicairkan menjadi sejumlah kas yang telah diketahui jumlahnya dengan periode jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan serta tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan, disajikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

f. Piutang Usaha

Piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Penyisihan piutang ragu-ragu diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan penelaahan atas kolektibilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan penghasilan komprehensif dan disajikan dalam “beban lain-lain”. Ketika piutang usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap “beban lain-lain” pada laporan penghasilan komprehensif.

g. Persediaan

Persediaan dinilai dengan harga perolehan. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi nilai bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode pertama-masuk, pertama-keluar (“FIFO”). Harga perolehan barang jadi dan pekerjaan dalam proses terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya *overhead* produksi (berdasarkan kapasitas normal operasi). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

h. Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka adalah biaya dibayar di muka dan uang muka kegiatan pada Universitas yang dicatat sebagai aset sebelum digunakan. Akun ini terdiri dari uang muka dan biaya dibayar di muka.

Uang muka kegiatan

Uang muka kegiatan merupakan pemberian dana kepada masing-masing unit/fakultas pada Universitas yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.

Uang muka kegiatan yang diharapkan akan direalisasikan 12 bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan selebihnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sepanjang masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan BAB III - Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat 6 dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

	Masa Manfaat
Gedung dan bangunan	50 tahun
Peralatan dan mesin	2 s.d 15 tahun
Jalan, irigasi dan jaringan	4 s.d 40 tahun
Aset tetap lainnya	4 tahun

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika besar kemungkinan Universitas mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan penghasilan komprehensif dalam periode keuangan ketika biaya tersebut terjadi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi dalam penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan.

Hibah diakui ketika terdapat keyakinan yang memadai bahwa Universitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Aset tetap yang diperoleh melalui hibah dicatat dalam kategori aset tetap yang sesuai dan diukur menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen atau sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan oleh pemberi hibah.

j. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus dan nilai sisa, sedangkan aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Amortisasi dimulai pada bulan berikutnya setelah aset takberwujud diperoleh dan digunakan berdasarkan masa manfaat yaitu sebagai berikut:

	Masa manfaat
Software	4 tahun
Lisensi	10 tahun
Master bahan ajar	7 tahun
Hasil riset dan penelitian	3 tahun
Hak kekayaan intelektual	10 tahun

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi atas perubahan masa manfaat suatu aset tetap ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan. Masa manfaat aset takberwujud ditentukan dengan berpedoman Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan BAB III - Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat 6 dengan estimasi masa manfaat yang tidak berubah dengan kebijakan sebelumnya.

k. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN"). Investasi jangka panjang pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, investasi jangka panjang dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu biaya perolehan diamortisasi.

l. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal atau dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

m. Dana Abadi

Dana abadi merupakan dana hibah suatu program penghimpunan dana yang hasil investasinya akan dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pendidikan dan pembelajaran di Universitas. Pembentukan dana ini ditetapkan peruntukannya oleh pemberi sumber daya dan disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan reksadana.

Pendapatan investasi dan pengembangan dana abadi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif pada saat periode terjadinya sebagai pendapatan dengan pembatasan atau tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan pembatasan yang diterapkan pada dana abadi.

n. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang karyawan pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Liabilitas sehubungan dengan program imbalan pasti diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan dan disesuaikan dengan laba atau rugi aktuarial dan biaya jasa lalu. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen berdasarkan PSAK 219: Imbalan Pascakerja.

o. Aset Neto

Aset neto adalah hak residual Universitas atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Aset neto Universitas terdiri atas aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.

Aset Neto tanpa Pembatasan

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset netto tanpa pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan Universitas.
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- d. Pengalihan aset netto dengan pembatasan menjadi aset netto tanpa pembatasan.

Aset Neto dengan Pembatasan

Aset netto dengan pembatasan adalah aset netto berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan aset netto tersebut oleh Universitas.

Aset netto dengan pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan Universitas.
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

p. Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Universitas melakukan penilaian transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Penentuan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak Universitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh mitra kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan Universitas berasal dari aktivitas sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional yang terdiri dari pendapatan penyelenggaraan pendidikan, pendapatan kerjasama pendidikan dan kemitraan lainnya.
2. Hibah, bantuan beasiswa dan dana abadi.
3. Dana pemerintah dan bantuan pendanaan pendidikan (Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri ("BPPTN")).
4. Pendapatan lain-lain.

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Universitas seperti yang dijelaskan di bawah:

1) Operasional

Pendapatan penyelenggaraan pendidikan diakui saat jasa telah diberikan kepada mahasiswa atau saat suatu kondisi dalam kontrak dengan pihak eksternal telah terpenuhi.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Hibah, bantuan beasiswa dan dana abadi
Pendapatan hibah/bantuan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, pemerintah atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi Universitas untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi hibah dengan pembatasan dan hibah tanpa pembatasan. Hibah dengan pembatasan adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah/donatur. Hibah tanpa pembatasan adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah/donatur. Pendapatan atas hibah/sumbangan berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan hibah/sumbangan berupa uang diakui pada saat uang tersebut diterima Universitas.
- 3) Dana BPPTN dan APBN
Pendapatan dana BPPTN dan APBN diakui saat Universitas berhak atas sejumlah dana dimana ketentuan yang disyaratkan telah terpenuhi. Pendapatan Bantuan Pendanaan PTNBH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan Pendanaan PTNBH dialokasikan dalam APBN Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Tinggi. Bantuan Pendanaan PTNBH dikelola secara otonom oleh Universitas sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang telah disusun.
- 4) Pendapatan lain-lain
Merupakan pendapatan bunga dari rekening giro dan deposito berjangka yang diakui saat pendapatan dapat diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya. Beban diakui dalam aset neto ketika terdapat penurunan manfaat ekonomis di masa mendatang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang timbul yang dapat diukur secara andal.

q. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan penghasilan komprehensif, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke aset neto. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di surat pemberitahuan (SPT) tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar. Pajak penghasilan kini dihitung menggunakan tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2017 tentang "Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum", Universitas sebagai PTNBH adalah subjek pajak penghasilan badan dimana pajak akan dikenakan atas kenaikan aset neto yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kenaikan aset neto yang telah disesuaikan akan dikecualikan dari perhitungan pajak jika kenaikan tersebut akan dimanfaatkan sebagai pengeluaran belanja modal dalam waktu empat tahun semenjak diperoleh.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill*. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan suku bunga pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Universitas membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

Masa manfaat aset tetap

Universitas menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan terkait untuk aset tetap. Universitas akan merevisi beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dengan masa manfaat yang diestimasi sebelumnya, atau akan menghapusbukukan atau menurunkan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non- strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Nilai tercatat aset tetap yang diperoleh melalui hibah

Nilai tercatat aset tetap yang diperoleh melalui hibah diukur berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen atau sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan oleh pemberi hibah dan disesuaikan dengan beberapa faktor seperti penyusutan dan keusangan.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari uang tunai, saldo rekening di bank, deposito dan tabungan lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas	1.246.009.870	2.664.834.945
Rekening Penerimaan		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rek. 00044.01.30.000789.5	494.064.775.529	488.243.923.055
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rek. 1173.01.000543.30.3	15.841.285.628	48.291.803.594
Rek. 1173.01.000544.30.9	12.753.961.592	4.644.682.213
Rek. 1173.01.000545.30.5	8.570.767.765	17.554.494.096
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rek. 1640020227775	24.499.097.200	19.915.483.605
Rek. 1640020229995	8.755.516.897	4.547.930.052
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Rek. 4322243222	15.540.081.690	4.394.327.383
Rek. 4611146111	6.093.710.796	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rek. 1734684568	10.822.085.734	8.285.260.396
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Rek. 0080103000132	805.920.647	-
	597.747.203.478	595.877.904.394
Rekening Pengeluaran		
Rekening Giro selain APBN - Pengeluaran Unit	108.019.591.161	88.587.846.676
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rek. 1173-01-000536-30-6	27.598.560.295	6.508.572.300
Rek. 1173-01-000573-30-8	20.720.045.150	-
Rek. 1173-01-000574-30-4	2.482.825.061	-
	158.821.021.667	95.096.418.976
Rekening Dana Kelolaan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rek. 164.0020.22.8989	1.891.586.373	1.696.406.760
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rek. 117301000581301	929.295	-
	1.892.515.668	1.696.406.760
Deposito Jangka Pendek		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	377.000.000.000	457.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	365.000.000.000	390.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	307.000.000.000	352.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60.000.000.000	60.000.000.000
	1.309.000.000.000	1.459.000.000.000
Tabungan Lainnya	100.000.000.000	50.000.000.000
	2.168.706.750.683	2.204.335.565.075

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tingkat suku bunga tahunan atas deposito jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Deposito	5,75% - 7%	6% - 7%

Tabungan lainnya merupakan dana yang ditempatkan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam waktu jangka pendek untuk mendapatkan jasa giro yang lebih kompetitif.

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari piutang kegiatan akademik dan kegiatan non akademik per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang dari Kegiatan Akademik		
Pendidikan Mitra Pemerintah		
Dinas Pendidikan Hulu Sungai Selatan	104.000.000	-
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	-	100.900.000
	<u>104.000.000</u>	<u>100.900.000</u>
Pendidikan Mitra Selain Pemerintah		
Mahasiswa UT Jambi	3.563.695.763	3.591.695.763
BTPN Syariah	280.984.481	-
Yayasan Bangun Indonesia Sejahtera		
Maslahat	230.000.000	-
Yayasan Tangan Pengharapan	39.182.774	-
PT Pantai Indah Kapuk Dua	1.500.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	-	5.438.200.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	578.528.790
PT Passion Abadi Korpora	-	25.085.408
PT Berdikari (Persero)	-	3.994.800
	<u>4.115.363.018</u>	<u>9.637.504.761</u>
Total Piutang dari Kegiatan Akademik	4.219.363.018	9.738.404.761
Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai Piutang	<u>(4.172.028.497)</u>	<u>(3.715.577.302)</u>
Neto Piutang dari Kegiatan Akademik	<u>47.334.521</u>	<u>6.022.827.459</u>
Piutang dari Kegiatan Non-Akademik		
UPN Jakarta	1.000.000.000	-
PT Buqu Global	52.826.079	52.826.079
	<u>1.052.826.079</u>	<u>52.826.079</u>
Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai Piutang	<u>(980.633.179)</u>	<u>(52.826.079)</u>
Neto Piutang dari Kegiatan Non-Akademik	<u>72.192.900</u>	<u>-</u>
Neto Piutang	<u>119.527.421</u>	<u>6.022.827.459</u>

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Piutang dari kegiatan akademik merupakan piutang pada mitra Pemerintah maupun mitra selain Pemerintah atas kontrak kerja sama Pendidikan, bantuan beasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Piutang mahasiswa UT Jambi merupakan piutang yang pada tahun 2012 dicatat sebagai piutang beasiswa kerjasama, namun saat ini sudah dibebankan kepada mahasiswa karena pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pembayaran secara langsung kepada mahasiswa. Hingga 31 Desember 2024, saldo piutang tercatat sebesar Rp3.563.695.763.

Piutang dari kegiatan non-akademik pada PT Buqu Global merupakan atas kegiatan non operasional Universitas yaitu penjualan bahan ajar digital dengan perjanjian No. 189/UN31/DN/2014 dan PKS No. 47/PKS/UT-TB/V/2014 tanggal 20 Mei 2014. Universitas menyediakan konten digital yang akan dijual kepada pelanggan melalui Toko Buku Digital (TBD) dan PT Buqu Global sebagai penyedia *platform* Solusi teknologi penerbitan dan distribusi konten digital, aplikasi TBD, aplikasi baca buku digital, system\ pelaporan transaksi, dan pengamanan data, serta aplikasi pemasangan iklan.

Piutang UPN Jakarta merupakan piutang yang berasal dari pembelian aplikasi ProMise, yaitu untuk pembayaran termin II sebesar Rp1.000.000.000 di mana pada tahun lalu piutang tercatat sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Berikut piutang dan penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belum Lewat Jatuh Tempo	280.984.481	25.085.408
Lewat Jatuh Tempo:		
0 - 30 Hari	269.182.774	6.117.628.790
31-90 Hari	-	3.994.800
91-180 Hari	105.500.000	-
181 - 360 Hari	-	-
Lebih dari > 360 Hari	4.616.521.842	3.644.521.842
	<u>5.272.189.097</u>	<u>9.791.230.840</u>
Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai Piutang	<u>(5.152.661.676)</u>	<u>(3.768.403.381)</u>
Neto Piutang	<u>119.527.421</u>	<u>6.022.827.459</u>

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi piutang, Universitas berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai. Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian per 31 Desember 2024 menggunakan tingkat suku bunga yang ada pada *Jakarta Interbank Offered Rate* (Jibor) sebesar 7,2% (tujuh koma dua persen).

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini merupakan pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya Sewa		
Sewa Rumah Dinas	168.409.720	285.421.296
Sewa Ruang Kantor	-	239.699.445
Sewa Gedung	19.791.667	3.125.000
Sewa Lainnya	635.462.002	13.320.000
Biaya Pembelajaran Digital	215.183.461	57.191.072
Neto Piutang	1.038.846.850	598.756.813

Biaya dibayar di muka sewa lainnya adalah biaya sewa pada Yokke Biz yang merupakan *platform* digital yang dapat mempermudah pengelolaan bisnis pada UT dan atas Qontak yang merupakan penyedia aplikasi *CRM Omnichannel* dan *Customer Service* berbasis *cloud*.

Biaya pembelajaran digital merupakan biaya *subscription* Azure yang merupakan aplikasi yang memberikan layanan penyimpanan (*cloud*) dan jaringan.

7. UANG MUKA

Uang muka kegiatan merupakan pembayaran di muka dari Universitas kepada unit-unit kerja di lingkungan Universitas untuk melakukan kegiatan operasionalnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	345.867.991	13.702.100
Pengadaan Barang dan Jasa	1.100	19.019.939
Sekolah Pasca Sarjana	-	225.750.472
Pusat Sumber Daya Manusia	-	64.923.559
Direktorat Pemasaran dan Kerjasama	-	55.255.526
Lembaga Layanan Operasional Pembelajaran	-	25.709.400
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	-	21.554.500
Fakultas Ekonomi	-	5.474.300
Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia	-	2.965.750
Pusat Pengolahan Pengujian	-	2.038.250
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	-	1.610.712
Kantor Pengawas Internal	-	1.336.450
Pusat Layanan Bahan Ajar	-	1.363.150
Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	-	1.284.600
Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	-	1.144.000
Unit Lainnya	300.000	197.647.113
	346.169.091	640.779.821

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uang muka lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan saldo atas dana penelitian.

Uang muka unit lainnya merupakan uang muka yang diberikan kepada bendahara unit di antaranya pada unit Pusat Pengelolaan Keuangan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, serta unit-unit daerah.

8. PERSEDIAAN

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan Barang Pendukung Pembelajaran	84.378.880.497	193.035.897.528
Persediaan Pendukung Akademik	19.783.369.250	15.341.927.425
Persediaan Operasional Kantor	6.105.320.127	6.256.014.744
Persediaan Pendukung Pemasaran dan Kerja Sama	1.834.869.645	553.466.832
Persediaan Medis	120.037.227	214.193.558
Persediaan Pendukung Unit Bisnis	53.480.796	99.302.956
Persediaan Lainnya	300.700.870	257.404.790
	112.576.658.412	215.758.207.833

Persediaan barang pendukung pembelajaran terdiri dari persediaan aktif. Persediaan aktif terdiri atas persediaan bahan ajar sebesar Rp79.141.740.731 dan persediaan pendukung informasi pembelajaran akademik sebesar Rp5.237.139.766. Persediaan non aktif, yaitu terdiri atas persediaan bahan ajar sebesar Rp1.219.392.257 dan persediaan pendukung informasi pembelajaran akademik sebesar Rp277.289.163 yang nilainya telah dihapuskan dari laporan keuangan karena dinilai tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa depan.

Persediaan lainnya merupakan persediaan atas kelengkapan kearsipan.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga investasi. Pendapatan yang sampai per 31 Desember 2024 dan 2023 belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bunga Deposito		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	219.178.082	208.356.160
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	155.182.192	188.054.795
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	322.961.655	162.767.181
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	71.671.233	76.712.329
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.821.918	29.589.041
Bunga Investasi Jangka Panjang	144.807.097	-
Sewa Ruang	13.333.333	-
Bunga Investa BTN	12.054.794	16.438.356
Jasa Layanan Teknologi Informasi	-	1.000.000.000
	970.010.304	1.681.917.862

Pendapatan yang masih harus diterima atas sewa ruang oleh Yayasan Dharma Ananda Indonesia merupakan sewa pada salah satu gedung di lingkungan UT Pusat.

10. INVESTASI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN") per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp150.000.000.000 dan Rp0.

Investasi merupakan investasi kepada Badan Wakaf Indonesia menggunakan dana abadi untuk SBSN seri SW007 dengan persentase kepemilikan 100%. SBSN tersebut diterbitkan dengan cara *private placement* dan tidak dapat diperdagangkan, dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000 dan memiliki imbal hasil sebesar 6,65% dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan 25 April 2024 sampai dengan 25 April 2029.

Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan dana abadi yang hanya boleh diinvestasikan dan tidak dapat digunakan untuk operasional UT kecuali ada keputusan lain dari Rapat Pleno MWA. Investasi dana abadi harus mempertimbangkan tingkat pengembalian dan risiko, yang dapat berupa surat berharga negara dan/atau surat berharga lain yang dikeluarkan oleh BUMN.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP

Aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.083.207.111.975 dan Rp948.076.755.137. Rincian aset tetap terdiri dari:

31 Desember 2024					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Koreksi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	104.444.861.013	21.028.436.901	-	2.860.000	125.476.157.914
Bangunan	774.526.228.865	5.964.621.000	(169.142.000)	109.688.196.398	890.009.904.263
Peralatan dan mesin	740.888.701.050	57.270.904.572	-	66.498.122.800	864.657.728.422
Jalan, irigasi dan jaringan	69.379.158.169	5.686.088.425	-	925.626.000	75.990.872.594
Aset tetap lainnya	10.248.790.945	-	-	-	10.248.790.945
	1.699.487.740.042	89.950.050.898	(169.142.000)	177.114.805.198	1.966.383.454.138
Aset dalam penyelesaian	299.578.581.245	165.808.157.201	-	(177.114.805.198)	288.271.933.248
	1.999.066.321.287	255.758.208.099	(169.142.000)	-	2.254.655.387.386
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(438.568.212.092)	(50.635.923.806)	167.732.404	-	(489.036.403.494)
Peralatan dan mesin	(566.531.449.239)	(66.367.013.361)	-	209.454.238	(632.689.008.362)
Jalan, irigasi dan jaringan	(44.947.223.870)	(3.680.106.876)	-	-	(48.627.330.746)
Aset tetap lainnya	(942.680.949)	(152.851.860)	-	-	(1.095.532.809)
	(1.050.989.566.150)	(120.835.895.903)	167.732.404,00	209.454.238	(1.171.448.275.411)
Nilai buku bersih	948.076.755.137				1.083.207.111.975

31 Desember 2023					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Koreksi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Tanah	-	104.452.190.240	(7.329.227)	-	104.444.861.013
Bangunan	767.369.231.165	88.652.847.128	(81.495.849.428)	-	774.526.228.865
Peralatan dan mesin	665.021.878.041	100.272.571.264	(24.405.748.255)	-	740.888.701.050
Jalan, irigasi dan jaringan	69.379.158.169	-	-	-	69.379.158.169
Aset tetap lainnya	10.206.737.945	42.053.000	-	-	10.248.790.945
	1.511.977.005.320	293.419.661.632	(105.908.926.910)	-	1.699.487.740.042
Aset dalam penyelesaian	192.096.039.776	107.488.158.909	(5.617.440)	-	299.578.581.245
	1.704.073.045.096	400.907.820.541	(105.914.544.350)	-	1.999.066.321.287
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(80.428.255.552)	(38.575.281.089)	-	(319.564.675.451)	(438.568.212.092)
Peralatan dan mesin	(538.045.905.294)	(45.701.617.847)	-	17.216.073.902	(566.531.449.239)
Jalan, irigasi dan jaringan	(20.594.529.123)	(3.468.957.984)	-	(20.883.736.763)	(44.947.223.870)
Aset tetap lainnya	(946.265.014)	(157.008.672)	-	160.592.737	(942.680.949)
	(640.014.954.983)	(87.902.865.592)	-	(323.071.745.575)	(1.050.989.566.150)
Nilai buku bersih	1.064.058.090.113				948.076.755.137

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan aset tetap berupa tanah pada tahun 2024 terdiri dari:

Luas Tanah	Lokasi
4.980	Jl. Jenderal Soedirman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
2.841	Jl. Merica, Kel. Pondok Cabe Udik, Kota Tangerang Selatan
1.176	Jl. Kampus No.54, Kel. Grendeng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Aset berupa tanah terletak di UT Pusat dan 38 UT Daerah yang digunakan oleh UT tidak dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan KMK No.427 Tahun 2023 tentang Penetapan Kekayaan Awal PTNBH Per 1 Januari 2023 yang terdiri dari:

Luas Tanah	Lokasi
3.000	Jl. Woltermonginsidi Lateri, Ambon
3.082	Jl. Panyileukan Raya No. 1 A, Soekarno-Hatta, Bandung
2.816	Jl. KH. Soleh Iskandar No. 234, Tanah Sareal, Bogor
3.508	Jl. Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu
3.353	Jl. Sultan Adam No. 128, Banjarmasin
9.950	Jl. Gurita No. 11 Sesetan, Denpasar
5.513	Jl. Achmad Nadjamudin No. 27, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Gorontalo
3.042	Jl. Ahmad Yani No. 43 (By pass) Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman, Jakarta Timur
4.377	Jl. Gajah Mada No.51, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi
3.063	Jl. SPG Teruna Bhakti Waena, Abepura Jayapura Papua
7.517	Jl. Kaliurang No. 2-A, Jember
3.156	Jl. Soekarno-Hatta No. 108B Rajabasa, Bandar Lampung
2.792	Jl. Pulau Indah No. 6, Oesapa Barat, Kupang
3.402	Jl. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu Bundaran Anduonohu, Kendari
4.000	Jl. Sultan Hasanuddin No. 2 Majene
3.432	Jl. Raya By Pass Km.13 Sungai Sapih, Padang
3.662	Jalan Perintis Kemerdekaan
2.100	Jl. Monginsidi Baru No. 7, Makassar
3.310	Jl. Soedjono No. 78 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB
4.592	Jl. Sam Ratulangi Raya Manado-Tomohon, Kec. Winangun, Manado
6.071	Jl. Bromo No. 29 Medan, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
3.252	Jl. Kampus No. 54 Grendeng, Purwokerto
1.484	Jl. Karya Bakti, Pontianak
5.947	Jl. Pendidikan, Jalur 2 Untad Tondo, Palu
1.502	Jl. Sultan M. Mansyur, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang
4.467	Jln. Kol. H. Burlian KM. 10, Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang
4.407	Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, PemProv. Kep Bangka Belitung Air Hitam, Pangkal Pinang
2.478	Jalan Arifin Ahmad No. 111 Pekanbaru
1.959	Jl. G. Obos Km. 3,5 No. 177, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
2.700	Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 14,5, Mangkang Wetan, Semarang
1.890	Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo, Surabaya
6.500	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya
14.497	Jl. Raya Jakarta Km. 7 Pakupatan, Serang, Banten
20.000	Jl. Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim
4.011	Jl. H.A.M.M. Rifaddin, Samarinda Seberang
3.922	Jl. Basuki Rahmat, KM 11,5 Sorong, Papua Barat
3.339	Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 9,5 Mojolaban, Sukoharjo
3.663	Jl. Mulawarman No. 234
3.245	Jl. Bantul No. 81 Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron Yogyakarta
940	Jl. Raya Mangga Dua, Kota Ternate

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan risalah Lelang nomor 144/07/33/2024 tanggal 19 oktober 2024, UT melakukan Lelang atas bangunan Pos Jaga dengan nilai perolehan sebesar Rp169.142.000 dan nilai buku sebesar Rp1.409.596 dengan nilai lelang sebesar Rp19.500.000.

12. ASET LAINNYA

Aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp826.462.622 dan Rp1.631.422.283. Rincian aset lainnya terdiri dari:

	31 Desember 2024				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Aset Hak Guna	-	-	-	399.115.000	399.115.000
Software	10.834.415.021	-	-	-	10.834.415.021
Lisensi	782.601.441	-	-	-	782.601.441
Aset lain-lain	5.766.351.137	-	(169.500.000)	-	5.596.851.137
	<u>17.383.367.599</u>	<u>-</u>	<u>(169.500.000)</u>	<u>399.115.000</u>	<u>17.612.982.599</u>
Akumulasi penyusutan					
Aset Hak Guna	-	-	-	(214.688.750)	(214.688.750)
Software	(9.807.696.040)	(824.910.804)	-	-	(10.632.606.844)
Lisensi	(625.640.614)	(54.087.648)	-	-	(679.728.262)
Aset Lain-lain	(5.318.608.662)	(110.387.460)	169.500.000	-	(5.259.496.122)
	<u>(15.751.945.316)</u>	<u>(989.385.912)</u>	<u>169.500.000</u>	<u>(214.688.750)</u>	<u>(16.786.519.978)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.631.422.283</u>				<u>826.462.621</u>

	31 Desember 2023				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Software	10.359.415.021	-	-	475.000.000	10.834.415.021
Lisensi	782.601.441	-	-	-	782.601.441
Aset takberwujud lainnya	475.000.000	-	-	(475.000.000)	-
Aset lain-lain	5.766.351.137	-	-	-	5.766.351.137
	<u>17.383.367.599</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>475.000.000</u>	<u>17.383.367.599</u>
Akumulasi penyusutan					
Software	(8.977.697.924)	(883.866.708)	-	53.868.592	(9.807.696.040)
Lisensi	(587.520.720)	(56.177.658)	-	18.057.764	(625.640.614)
Aset takberwujud lainnya	(118.750.000)	-	-	118.750.000	-
Aset lain-lain	(2.756.222.685)	(113.513.594)	-	(2.448.872.383)	(5.318.608.662)
	<u>(12.440.191.329)</u>	<u>(1.053.557.960)</u>	<u>-</u>	<u>(2.258.196.027)</u>	<u>(15.751.945.316)</u>
Nilai buku bersih	<u>4.943.176.270</u>				<u>1.631.422.283</u>

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp169.500.000 merupakan reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap pada akun Peralatan dan Mesin berupa Mini Bus Toyota Innova G M/T 2.0 MET tahun perolehan 2005 dengan NUP 1210203020004.246 yang dimiliki oleh UT Malang dengan Plat Nomor N 486 AP dan masih digunakan sebagai kendaraan operasional kantor.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan utang kepada pihak ketiga yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dana Unit yang Belum Dibayarkan	106.743.639.933	89.224.244.007
Pengembalian Sisa Dana PRPTN	308.927.518	-
Pengembalian Sisa Dana IKU	127.960.000	263.301.640
Pengeluaran PPBI yang belum dibayarkan	63.720.079	117.770.125
PT Sagamartha Ultima Indonesia	60.000.000	-
PT Estrella Delapanbelas Indonesia	39.500.000	-
Bumi Adhi Persada	37.445.250	-
Beasiswa PT Kaltim Prima Coal - UT Samarinda	12.000.000	18.000.000
Pengembalian Sisa Dana MKWK	126.009	-
PT Neo Dinamika	-	68.950.000
Beasiswa Pemda Cilegon	-	39.000.000
Dana Lain-lain	9.880.000	49.456.168
	107.403.198.789	89.780.721.940

Utang usaha atas beasiswa PT Kaltim Prima Coal merupakan utang atas beasiswa KPC Kutim Cerdas dan Budaya, utang usaha ini terkait dengan pemberian beasiswa kepada dua penerima, masing-masing sebesar Rp6.000.000.

Dana unit yang belum dibayarkan merupakan kewajiban Universitas atas pembayaran kegiatan operasional unit kerja yang ditanggihkan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	29.777.177.325	23.115.167.250
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	28.649.069.150	22.152.614.060
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	28.547.156.350	20.582.162.000
Fakultas Sains dan Teknologi	6.127.660.950	25.229.000
Sekolah Pascasarjana	783.686.000	29.204.359
Pusat Pengelola Bisnis dan Investasi	246.404.000	224.936.700
Pusat Pengelolaan Keuangan	125.133.073	474.177.774
Direktorat Sistem Informasi	39.918.250	10.500.000
Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	39.628.400	142.573.750
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	39.066.800	393.823.250
Direktorat Pemasaran dan Kerjasama	37.149.100	-
Pusat Perencanaan dan Pelaporan	25.406.800	41.418.100
Kantor Pengawas Internal	12.133.887	881.000
Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia	7.080.545	7.937.980
Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	7.024.000	4.599.850
Pusat Sumber Daya Manusia	-	219.996.054
Pusat Layanan Bahan Ajar	-	154.580.250
Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	-	5.148.000
Kumpulan Unit Universitas Terbuka Daerah	12.279.945.303	21.639.294.630
	106.743.639.933	89.224.244.007

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pengembalian sisa dana PRPTN merupakan pengembalian sisa dana bantuan pemerintah berupa dana Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PR-PTN). Pengembalian sisa Dana IKU (Insentif Kinerja Utama) merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Universitas sebagai bagian dari mekanisme pendanaan berbasis kinerja untuk dikembalikan ke Kas Negara. Pengembalian sisa dana MKWK merupakan dana atas Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya yang masih harus dibayar merupakan beban Listrik dan telepon di Bulan Desember 2024 yang sudah digunakan namun belum dibayarkan. Rincian biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Listrik	1.340.562.673	1.324.570.123
Telepon	44.983.176	46.679.408
	1.385.545.849	1.371.249.531

15. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan dana dari kegiatan akademik dan kegiatan non akademik untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Diterima di Muka Layanan Akademik		
Layanan Pendidikan Akademik	17.562.502.808	14.019.675.204
Jasa Akademik Lainnya	6.824.947.071	-
Pendapatan Diterima di Muka Non Layanan Akademik		
Jasa Teknologi Informasi	3.214.382.888	1.232.855.777
Sewa Gedung dan Bangunan	385.289.040	234.462.963
Sewa Tanah	10.482.959	9.341.250
Jasa Selain Akademik Lainnya	-	11.125.783.000
	27.997.604.766	26.622.118.194

Pendapatan diterima di muka layanan akademik merupakan pendapatan atas dana beasiswa mahasiswa dan SPP mahasiswa diterima di muka TA 2024.2 dan TA 2025.1, serta registrasi mahasiswa TA 2025.1 yang diterima pada tahun 2024

Pendapatan diterima di muka atas jasa akademik lainnya per 31 Desember 2024 merupakan bantuan dari pemerintah atas dana Pendidikan Profesi Guru (PPG), sedangkan pendapatan diterima di muka atas jasa selain akademik lainnya per 31 Desember 2023 merupakan dana abadi sebesar Rp7.696.136.000 dan dana Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebesar Rp3.429.647.000.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Akun utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut::

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kelebihan Potong Pajak TER Jan-Nov	1.832.607.069	-
Uang Makan ASN Bulan Desember	863.998.000	795.653.500
DPLK Non PNS	9.000.000	-
Titipan Pajak	-	33.479.507
Kelebihan Pengembalian UMK yang Disetor Unit	-	106.777.284
Kelebihan Penyetoran Pengembalian Belanja	-	1.629.479
Utang Lainnya	37.734.016	-
	2.743.339.085	937.539.770

Utang lainnya mencakup kewajiban lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kategori utang jangka pendek lainnya, di antaranya atas kelebihan transfer unit, kelebihan pengembalian belanja unit, dan salah transfer atas PPh Pasal 23.

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Nurichwan, aktuaris independen dengan laporan No. 140/KKA-N/R-I/II/2025 tanggal 20 Februari 2025.

PSAK 219 paragraf 26 – 152 telah mengatur bagaimana pemberi kerja harus mengakui kewajiban dan beban imbalan pasti. Imbalan tersebut mencakup manfaat pensiun, sakit berkepanjangan (cacat tetap total), meninggal, dan pengunduran diri secara sukarela serta pembayaran uang pisah akibat terjadinya perpindahan kepemilikan Perusahaan tersebut dengan menggunakan asumsi-asumsi jumlah penghasilan serta masa kerja yang telah dilalui.

Metode perhitungan yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti ("NKKIP"), Biaya Jasa Kini, dan Biaya Jasa Lalu adalah metode *Projected Unit Credit* sesuai dengan PSAK 219 paragraf 67.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja pada Universitas sebanyak 663 orang karyawan tetap dan 87 orang karyawan PKWT.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris untuk mengestimasi liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2024.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti		
Tetap	994.849.442	-
PKWT	396.570.062	-
Nilai Wajar Aktiva Program Imbalan Karyawan	-	-
Dampak Batas Atas Aset Program	-	-
	1.391.419.504	-

Asumsi aktuarial utama yang digunakan aktuaris yang memenuhi syarat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Tetap	PKWT
Tingkat Kenaikan Gaji	3,00%	0,00%
Tingkat Diskonto	7,13%	6,54%
Tingkat Imbal Hasil Ekspektasian Hasil Program	0,00%	0,00%
Rata-rata Ekspektasian Sisa Masa Kerja	25,89	1,28

18. ASET NETO

Aset neto per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

a) Aset Neto Tanpa Pembatasan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	5.268.992.540.637	5.565.381.072.610
Kenaikan Aset Bersih Tahun Berjalan - Universitas	107.326.985.473	28.792.730.880
Koreksi Tahun Berjalan	(17.132.863.721)	(325.181.262.853)
	5.359.186.662.389	5.268.992.540.637

Rincian koreksi aset bersih pada 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyesuaian Penerimaan Denda	(9.062.940.902)	-
Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	(8.069.922.819)	(323.071.745.575)
Penyesuaian Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	(2.258.196.027)
Penyesuaian Persediaan	-	148.678.749
	(17.132.863.721)	(325.181.262.853)

Koreksi penerimaan denda merupakan atas keterlambatan pekerjaan, sementara koreksi penyusutan aset tetap dikarenakan adanya penyesuaian atas konstruksi dalam pembangunan atas gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

b) Aset Neto dengan Pembatasan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	(2.009.412.233.625)	(2.012.847.267.000)
Kenaikan Aset Bersih Tahun Berjalan	21.009.599.731	3.435.033.375
Koreksi Tahun Berjalan	-	-
	(1.988.402.633.894)	(2.009.412.233.625)

19. PENDAPATAN

Pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

a) Tanpa Pembatasan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanpa Pembatasan		
Layanan Akademik	2.044.448.162.139	1.633.365.082.756
Bunga Deposito dan Jasa Giro	100.088.786.244	61.890.198.425
Unit Bisnis	7.871.579.054	8.737.808.882
Investasi Surat Berharga	6.219.807.097	-
Hibah	3.298.072.000	3.359.304.258
Layanan Non Akademik	302.677.879	1.799.959.191
	2.162.229.084.413	1.709.152.353.512

Pendapatan Layanan Akademik merupakan pendapatan yang diterima dari mahasiswa atas jasa layanan akademik yang diberikan oleh UT sesuai dengan Keputusan Rektor UT dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanpa Pembatasan		
SPP Non Pendas	1.386.369.555.879	1.036.113.336.155
SPP Pendas	470.590.926.301	459.549.265.485
Admisi	54.032.582.710	43.442.452.518
SPP Program Pasca Sarjana (PPS)	39.154.063.350	34.942.401.119
Kerjasama Beasiswa	36.958.378.058	24.179.192.279
Upacara Penyerahan Ijazah	17.173.464.000	-
Tutorial Tatap Muka atas Permintaan	14.909.551.000	15.322.800.000
SPP Lewat Semester Pendas	8.417.150.000	7.322.070.000
Wisuda atau Toga	5.702.000.000	-
Ujian Sidang PPS	4.860.400.000	3.874.550.000
Penerbitan Salinan Ijazah	2.822.349.400	4.056.530.000
Admisi PPS	1.799.750.000	2.070.503.000
Bahan Ajar	1.375.412.557	2.134.534.337
Admisi Doktoral	190.601.571	148.088.226
Kekurangan SPP	62.627.313	136.119.637
Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa	26.700.000	67.240.000
Pengambilan Ijazah	2.650.000	4.000.000
SPP Lewat Semester PPS	-	2.000.000
	2.044.448.162.139	1.633.365.082.756

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan layanan non akademik merupakan pendapatan yang diterima dari pegawai, masyarakat umum, dan unit kerja atas aktivitas atau kegiatan yang menggunakan sumber daya di lingkungan Universitas seperti pendapatan seminar dan pendapatan jasa selain akademik lainnya berupa jasa dokumentasi, jasa katering, jasa pelatihan, dan jasa lainnya.

Pendapatan unit bisnis merupakan pendapatan yang diterima dari unit bisnis Universitas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Sewa Gedung dan Bangunan	5.361.401.200	5.658.481.537
Jasa Teknologi Informasi Bidang Non Akademik	1.272.027.304	2.765.903.012
Sewa Peralatan dan Mesin	278.424.186	251.351.000
Jasa Poliklinik	187.883.240	24.250.000
Sewa Tanah	52.723.291	37.823.333
Jasa Dokter Umum	35.055.042	-
Jasa Dokter Gigi	20.507.386	-
Pelatihan	12.741.641	-
Kursus	1.600.000	-
Lainnya dari Unit Bisnis	649.215.764	-
	7.871.579.054	8.737.808.882

Pendapatan lainnya dari unit bisnis merupakan pendapatan yang diterima dari bisnis yang dijalankan oleh Universitas seperti *Green Café*, dan *Laundry*.

Pendapatan bunga deposito dan jasa giro merupakan atas penerimaan dari bunga yang diperoleh atas saldo rekening giro, bunga deposito yang berasal dari penempatan deposito berjangka pada Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI dan BSI, serta bunga tabungan lainnya yang merupakan penerimaan atas tabungan investa.

Pendapatan investasi surat berharga merupakan pendapatan atas penerimaan investasi berupa imbalan atau kupon yang telah diterima sejak 25 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Badan Wakaf Indonesia dengan imbal hasil sebesar 6,65% per tahun.

Rincian penerimaan hibah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang Jasa	3.298.072.000	3.219.004.300
Unit Kerja Universitas Terbuka Daerah	-	113.999.960
Pusat Pengelola Bisnis dan Investasi	-	20.600.000
Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	-	5.699.998
	3.298.072.000	3.359.304.258

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun pendapatan hibah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diterima berupa peralatan dan mesin dari PT Bank Tabungan Negara (Perseo) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Merk/Type	BAST	Nominal
Mercedes-Benz Sprinter A3	08/BAST/CPT.II/FSU/VII/2024	2.737.172.000
Kendaraan Hiace Commuter M/T Vin 2024	16/BAST/CPT.II/FSU/XII/2024	560.900.000
		3.298.072.000

b) Dengan Pembatasan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dengan Pembatasan		
Pendapatan Bantuan Pendanaan PTNBH	40.000.000.000	50.000.000.000
Pendapatan APBN Lainnya	164.656.125.585	127.125.590.810
	204.656.125.585	177.125.590.810

Pendapatan Bantuan Pendanaan PTNBH merupakan bantuan yang dialokasikan dari APBN yang digunakan untuk biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan yang dilakukan secara triwulan. Sesuai dengan surat Nomor 1235/E.E/PR.07.04/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum Tahun Ajaran 2024 ditetapkan alokasi dana bantuan BPPTNBH UT sebesar Rp40.000.000.000, dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Triwulan I	-	12.074.959.750
Triwulan II	19.823.796.469	13.940.118.212
Triwulan III	8.509.752.000	11.457.848.187
Triwulan IV	11.666.451.531	12.527.073.851
	40.000.000.000	50.000.000.000

Pendapatan APBN Lainnya merupakan alokasi dana APBN untuk membiayai belanja operasional melalui DIPA Universitas yang terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Gaji APBN (Gaji PNS dan PPPK)	127.897.438.498	122.788.509.450
Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	18.866.975.482	-
Dana Abadi Perguruan Tinggi	7.141.725.746	-
Dana Pendidikan Profesi Guru	6.376.422.377	954.383.000
Dana Indikator Kinerja Utama	3.623.040.000	3.382.698.360
National University Debating Championship	587.861.100	-
Dana Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi	98.105.600	-
Mata Kuliah Wajib Kurikulum	64.556.782	-
	164.656.125.585	127.125.590.810

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat kontrak pada tanggal 1 Desember 2024 dengan Rektor Universitas Terbuka dalam rangka pelaksanaan dan pendanaan program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun 2024. Hasil pendanaan tersebut diterima Universitas sebesar Rp19.175.903.000, di mana penggunaan dana program harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh pemberi dana. Hingga akhir tahun 2024, dana tersebut telah dipergunakan sebesar Rp18.866.975.482 dengan nilai sisa Rp308.927.518 yang harus dikembalikan kepada pemberi dana.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program Dana Abadi Perguruan Tinggi 2023, sebagaimana telah diaddendum pada 19 Juli 2024. Program Dana Abadi Perguruan Tinggi didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bersumber dari hasil pengembangan dana abadi perguruan tinggi. Nilai pendanaan sebesar Rp9.816.500.000 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sesuai dengan proposal yang diajukan, sampai dengan 31 Desember 2023 UT telah menerima dana tersebut sebesar Rp7.696.136.000 atau sebesar 80% dari yang sudah diajukan, sementara 20% akan dicairkan setelah menyampaikan laporan kemajuan dan pertanggungjawaban. Sisa pendanaan yang belum digunakan, wajib dikembalikan kepada LPDP, program Dana Abadi berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.

Pada tahun 2024, Universitas Terbuka melakukan Kerjasama dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdiri dari:

- 1) Universitas Negeri Jakarta, ujian bagi peserta PPG
- 2) Direktorat Pendidikan Profesi Guru, dalam rangka pelaksanaan PPG, dengan sumber pembiayaan dari LPDP
- 3) Direktorat Pendidikan Profesi Guru, dalam rangka pelaksanaan PPG, sumber pembiayaan melalui pencairan Bantuan Lainnya
- 4) Direktorat Pendidikan Profesi Guru, dalam rangka pelaksanaan PPG, sumber pembiayaan melalui pencairan Beasiswa

Penerimaan dana atas dana Pendidikan profesi guru adalah senilai Rp10.759.472.000. Atas dana tersebut, terdapat penggunaan dana sebesar Rp6.381.775.004.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2024 tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023. Penerima penghargaan capaian IKU PTN Tahun 2023 salah satunya pada kategori IKU Liga Perguruan Tinggi (PTN) Badan Hukum. Total insentif yang diterima oleh Universitas Terbuka adalah sebesar Rp3.751.000.000.

Perjanjian kerja sama dengan Pejabat pembuat komitmen Balai pengembangan talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberian bantuan pemerintah operasional penyelenggaraan ajang talenta jenjang pendidikan tinggi tahun anggaran 2024 merupakan perjanjian berupa pemberian bantuan pemerintah operasional penyelenggaraan ajang talenta jenjang pendidikan tinggi tahun anggaran 2024 di bidang seni budaya dan literasi *National University Debating Championship* (NUDC). Jumlah bantuan yang diberikan adalah senilai Rp724.864.000.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerjasama dengan Universitas Terbuka dalam rangka Sosialisasi Akademik dan Portofolio pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024. Jangka waktu perjanjian selama 213 (dua ratus tiga belas) hari dari 2 Januari 2024 hingga 2 Agustus 2024. Nilai perjanjian sebesar Rp100.393.500.

Pendanaan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi digunakan untuk Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum. Jangka waktu perjanjian berlaku dari 6 Juni 2024 hingga 6 Desember 2024. Nilai perjanjian sebesar Rp70.000.000.

20. BEBAN

Beban untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

a) Tanpa Pembatasan

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Tanpa Pembatasan		
Beban Layanan		
Beban Jasa	507.910.138.877	464.126.362.742
Beban Persediaan	468.906.984.898	279.117.155.015
Beban Pegawai	208.413.491.410	182.184.854.697
Beban Perjalanan Dinas	88.915.036.601	86.138.528.615
Beban Pemasaran	61.365.314.386	64.702.656.558
Beban Barang dan Perlengkapan	52.209.551.231	54.346.729.454
Beban Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	45.917.630.608	42.374.440.166
Beban Pemeliharaan	12.382.396.541	9.742.345.447
Beban Peningkatan SDM	9.500.506.054	6.855.429.397
Jumlah Dipindahkan	<u>1.455.521.050.606</u>	<u>1.189.588.502.091</u>

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah Pindahan	1.455.521.050.606	1.189.588.502.091
Beban Administrasi Umum		
Beban Pegawai	335.945.614.084	295.759.015.947
Beban Depresiasi dan Amortisasi	113.591.093.508	88.956.423.552
Beban Jasa	44.986.156.234	28.302.405.803
Beban Pemeliharaan	34.101.050.000	35.854.085.186
Beban Barang dan Perlengkapan	26.926.963.454	22.141.738.002
Beban Perjalanan	14.483.834.630	14.488.032.234
Beban Peningkatan SDM	14.083.371.302	17.282.129.134
Beban Unit Usaha	4.154.616.645	5.350.162.504
Beban Persediaan	683.166.449	5.365.825.790
Beban Bantuan Sosial	548.080.424	45.777.264
	<u>589.503.946.730</u>	<u>513.545.595.416</u>
	<u>2.045.024.997.336</u>	<u>1.703.134.097.507</u>

b) Dengan Pembatasan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dengan Pembatasan		
Beban Layanan		
Beban Pegawai	86.871.348.187	82.110.465.859
Beban Jasa	7.528.259.000	1.485.720.138
Beban Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	1.763.458.120	-
Beban Peningkatan SDM	1.536.355.372	-
Beban Barang dan Perlengkapan	1.051.973.371	86.612.000
Beban Perjalanan Dinas	1.063.254.905	37.726.000
Beban Pemasaran	958.433.442	-
	<u>100.773.082.397</u>	<u>83.720.523.997</u>
Beban Administrasi Umum		
Beban Pegawai	42.480.053.311	41.321.277.591
Beban Jasa	40.221.850.391	48.475.496.757
Beban Perjalanan Administrasi dan Umum	55.704.270	-
Beban Barang dan Perlengkapan	25.219.485	173.259.090
Beban Peningkatan SDM	90.616.000	-
	<u>82.873.443.457</u>	<u>89.970.033.438</u>
	<u>183.646.525.854</u>	<u>173.690.557.435</u>

Beban unit usaha adalah beban atas pembelian pada unit usaha yang dimiliki Universitas seperti kebutuhan untuk *Green Café*, wisma, poliklinik, *laundry*, UTCC, dan unit usaha lainnya.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

21. PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan/(beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir 2024 dan 2023 terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan lainnya		
Pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	16.220.062.106	9.872.181.901
Denda Keterlambatan Pekerjaan	1.426.035.709	13.492.976.481
Pendapatan Lainnya	509.673.932	142.651.736
Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan	108.264.295	-
Keuntungan Selisih Kurs	-	836.000
	18.264.036.042	23.508.646.118
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban lainnya		
Beban Administrasi Keuangan		
Beban Pajak Rekening	19.917.406.317	607.799.622
Beban Pajak	396.961.213	-
Beban Administrasi Rekening	43.618.255	32.573.726
Beban Penyisihan Piutang		
Beban Penyisihan Piutang Pendidikan Mitra Selain Pemerintah	511.840.796	145.401
Beban Penyisihan Piutang Pendidikan Mitra Pemerintah	96.491.938	-
Beban Penyisihan Piutang Penelitian Mitra Pemerintah	-	93.652.494
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non-Akademik Lainnya	927.807.100	-
Beban Selisih Kurs	5.108	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	5.519.318.201	-
Beban Lainnya		
Beban Imbalan Pascakerja	727.688.644	-
Beban Lainnya	74	-
	28.141.137.646	734.171.243
	(9.877.101.604)	22.774.474.875

Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan merupakan penerimaan atas keterlambatan pengerjaan pembangunan, serta atas keterlambatan pengiriman bahan ajar.

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan di luar kegiatan utama Universitas seperti penerimaan piutang yang sebelumnya telah disisihkan dan uji coba QRIS.

Hasil penjualan aset yang dipisahkan adalah pendapatan atas lelang bahan ajar dan hasil lelang atas pos jaga.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban persediaan rusak/usang yang telah dihapuskan dan sudah dilelang sebesar Rp3.664.357.116 dengan SK Rektor Nomor 5504 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penghapusan BMUT berupa Bahan Ajar Non Aktif di UT. dan sebesar Rp1.854.961.085 sudah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola Barang Milik UT (BMUT) namun belum dilakukan pemindahtanganan.

Beban lainnya merupakan beban di luar kegiatan utama Universitas seperti pembulatan.

22. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PPH Pasal 21	3.288.277.118	271.786.845
PPH Pasal 23	2.132.254.174	8.622.900
PPH Pasal 4 Ayat 2	503.744.464	133.095.891
PPN Keluaran	129.311.914	-
Utang Pajak Daerah	32.813.199	-
Pemungutan PPN	-	40.790.200
	6.086.400.869	454.295.836

b. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Universitas untuk periode sejak penetapan saldo awal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah nihil. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2020 Pasal 4 yang menyatakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:

- Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dan
- Dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

Berdasarkan surat pernyataan Rektor No. B/124/UN31.PPKU/KU.03.03/2025 tanggal 17 Maret 2025 mengenai Surat Pernyataan Penggunaan Sisa Lebih Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa Universitas telah melakukan perhitungan PPh Badan Tahun 2024 dan diperoleh sisa lebih secara fiskal sebesar Rp64.928.569.775 (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Universitas Terbuka akan menggunakan sisa lebih secara fiskal dalam jangka waktu 4 tahun ke depan, sehingga sisa lebih tersebut dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dan tidak terdapat PPh Badan terutang untuk tahun 2024. Adapun pelaporan penggunaan sisa lebih dalam jangka waktu 4 tahun ke depan akan dilampirkan bersama dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2025.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kenaikan Aset Neto Sebelum Pajak Penghasilan	128.336.585.204	-
Beda Waktu:		
Pembentukan atau Penumpukan Dana	-	-
Cadangan	2.775.677.799	-
Selisih Depresiasi dan Amortisasi	(163.673.066)	-
	2.612.004.733	-
Beda Tetap:		
Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	(231.284.296.742)	-
Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan	3.066.600.163	-
Bantuan atau Sumbangan	142.318.956	-
Pajak Penghasilan	396.961.212	-
Lain-lain	161.658.396.248	-
	(66.020.020.163)	-
Laba Kena Pajak	64.928.569.774	-
Beban Pajak Penghasilan	-	-
Kredit Pajak	-	-
Taksiran Kurang/Lebih Bayar Pajak penghasilan	-	-

23. PERJANJIAN

a) Perjanjian Kerja Sama Jasa Teknologi Informasi

1) Universitas Nusa Cendana

Perjanjian kerja sama Universitas Nusa Cendana tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *promise* - terbuka pada Universitas Nusa Cendana pada tanggal 19 Januari 2023. Jangka waktu perjanjian selama 3 tahun terhitung sejak 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2026. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp1.235.920.000.

2) Universitas Veteran Jakarta

Perjanjian kerja sama dengan Universitas Veteran Jakarta tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *promise* - terbuka pada UPNVJ. Jangka waktu perjanjian selama 4 tahun terhitung sejak 19 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2026. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp1.500.000.000.

3) Universitas Syiah Kuala

Perjanjian kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *promise* - terbuka pada Universitas Syiah Kuala dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun terhitung sejak 19 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2026. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp2.000.000.000.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Universitas Halu Oleo
Perjanjian kerja sama dengan Universitas Halu Oleo tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi promise - terbuka pada Universitas Halu Oleo dengan jangka waktu perjanjian selama 15 bulan terhitung sejak 18 Oktober 2022 sampai dengan 18 Januari 2024. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp618.700.000.
 - 5) Universitas Halu Oleo
Perjanjian kerja sama dengan Universitas Halu Oleo tentang pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa melalui aplikasi promise-terbuka pada Universitas Halu Oleo. Jangka waktu perjanjian selama 15 bulan sejak 3 Mei 2024 hingga 3 Agustus 2025. Nilai perjanjian sebesar Rp207.480.000.
 - 6) Universitas Udayana
Perjanjian kerja sama Universitas Udayana tentang Pemanfaatan dan pengembangan solusi teknologi informasi pada Universitas Udayana dengan jangka waktu kerjasama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 9 September 2024 hingga 9 September 2027. Nilai perjanjian sebesar Rp2.120.000.000 (termasuk PPN dan PPh pasal 23).
 - 7) Universitas Lambung Mangkurat
Perjanjian kerja sama Universitas Lambung Mangkurat tentang pemanfaatan dan pengembangan solusi teknologi informasi pada Universitas Lambung Mangkurat dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun sejak 19 September 2024 hingga 19 September 2027. Nilai perjanjian sebesar Rp2.340.760.000 (termasuk PPN dan PPh pasal 23).
- b) Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan
- Perjanjian kerja sama dengan Yayasan Dharma Ananda Indonesia tentang Sewa lahan/tanah untuk TK Ananda dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung sejak 6 April 2024 sampai dengan 5 April 2027. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp112.095.000.
- c) Perjanjian Kerja Sama Sewa Gedung dan Bangunan
- 1) PT Pos Indonesia
Perjanjian kerja sama dengan PT Pos Indonesia tentang sewa kantor pada gedung pelayanan publik Universitas Terbuka dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun terhitung sejak 2 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp111.111.111. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai tanggal 31 Mei 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp111.111.111.
 - 2) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Perjanjian kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang sewa menyewa ruang ATM Mandiri di ATM Center Universitas Terbuka. Jangka waktu perjanjian 2 tahun terhitung sejak 16 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp50.000.000.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Perjanjian kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tentang sewa gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian tentang perpanjangan sewa penempatan ATM BRI pada Universitas Terbuka cabang Bogor tanggal 17 Juni 2022. Jangka waktu perjanjian 3 tahun terhitung sejak 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp36.000.000.
- Perjanjian tentang sewa tanah untuk ATM di UPBJJ Bandung tanggal 18 Oktober 2022. Jangka waktu perjanjian 3 tahun terhitung sejak 1 April 2022 sampai dengan 30 Maret 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp33.000.000.
- Perjanjian tanggal 6 November 2023 tentang sewa menyewa ruangan ATM TIM ATM 986191. Jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dari 8 November 2023 hingga 7 November 2025. Nilai perjanjian sebesar Rp53.000.000.
- Perjanjian tentang sewa menyewa ruangan ATM di Universitas Terbuka Jakarta tanggal 3 Januari 2024. Jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2024 hingga 1 Januari 2025. Nilai perjanjian sebesar Rp25.000.000.
- Perjanjian tentang sewa menyewa ruangan ATM TIM ATM 70236 tanggal 14 Maret 2024. Jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dari 17 Maret 2024 hingga 16 Maret 2026. Nilai perjanjian sebesar Rp53.000.000.

5) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Perjanjian kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tentang sewa gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian tentang sewa ruang kantor pada gedung pelayanan publik Universitas Terbuka tanggal 27 Agustus 2024. Jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dari 24 Agustus 2024 hingga 24 Agustus 2026. Nilai perjanjian sebesar Rp240.000.000.
- Perjanjian tentang sewa menyewa ruangan/lahan ATM tanggal 23 April 2024. Jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dari 30 April 2024 hingga 30 April 2026. Nilai perjanjian sebesar Rp53.000.000.
- Perjanjian tentang sewa menyewa ruangan ATM Bank Tabungan Negara (BTN) di UT Mataram tanggal 28 Februari 2024. Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun dari 28 Februari 2024 hingga 28 Februari 2027. Nilai perjanjian sebesar Rp66.000.000.

d) Perjanjian kerja sama bantuan beasiswa

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara

Perjanjian kerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara tentang Bantuan beasiswa pendidikan program studi prioritas daerah bagi Non ASN Kabupaten Kutai Kertanegara dengan jangka waktu perjanjian pada tahun akademik gasal 2023 sampai dengan genap 2026 dengan jumlah nilai perjanjian sebesar Rp2.195.000.000.

2) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Perjanjian kerja sama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tentang perjanjian pemberian beasiswa - terbuka pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan jangka waktu perjanjian berlaku sejak Tanggal Efektif dan akan berakhir pada 30 Juni 2028. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp305.750.000.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Perjanjian kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perjanjian pemberian beasiswa bagi mahasiswa program strata 1 pendidikan guru pendidikan anak usia dini dan penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan - terbuka pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nilai perjanjian adalah sebesar Rp934.000.000.
- 4) Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
Perjanjian kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tentang perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi S1 pendidikan guru sekolah dasar tahun anggaran 2024 di kabupaten malinau - terbuka pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2029. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp175.380.297.
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau
Perjanjian kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi tahun 2024 - terbuka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 1 tahun berdasarkan tahun anggaran atau tahun akademik selama 9 (sembilan) semester. Total nilai perjanjian adalah sebesar Rp112.400.000.
- 6) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Perjanjian kerja sama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan program sarjana dan pascasarjana tahun 2024 - terbuka pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 1 semester dimulai dari 18 Maret sampai dengan 31 Agustus 2024, Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.1 (masa registrasi 2024.1). Nilai perjanjian adalah sebesar Rp72.795.729.
- 7) Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tentang bantuan biaya pendidikan program sarjana strata 1 pada Universitas Terbuka - terbuka pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Besarannya bantuan biaya pendidikan adalah sebesar Rp309.624.047.
- 8) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tentang peningkatan pendidikan dan SDM melalui pemberian beasiswa gerbang cerdas mahulu Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2024 - terbuka pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 1 tahun anggaran 2024 atau selama 2 semester (2024.2 - 2025.1) sebesar Rp532.500.000.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian visi dan misi Universitas Terbuka (UT), keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Barang Milik UT (BMUT), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, UT menerapkan pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penerapan pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima bentuk pengendalian internal tersebut terintegrasi dan harus diterapkan secara keseluruhan.

Penilaian risiko merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian dari pelaksanaan sistem manajemen Perguruan Tinggi. Proses manajemen risiko terhadap pengelolaan Universitas merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement). Manajemen risiko merupakan metode yang tersusun secara logis, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian kegiatan suatu entitas, dan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan karakteristik risiko dan cara penanganannya (ISO 31000: 2018).

Komitmen terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan Universitas Terbuka tercantum dalam Rencana Strategis Antara Universitas Terbuka Tahun 2024-2025. Komitmen diawali dengan penyusunan pedoman manajemen risiko di masing-masing unit yang meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu level kebijakan, level proses, dan level produk. Untuk penyusunan manajemen risiko keuangan, unit Pusat Pengelolaan Keuangan merupakan risk owner yang menyusun daftar risiko terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

25. TRANSAKSI NON-KAS

Berikut aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Penambahan Aset Lainnya Melalui		
Aset Hak Guna	399.115.000	-
	<u>399.115.000</u>	<u>-</u>

26. STANDAR KEUANGAN AKUNTANSI BARU DAN PENYESUAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru serta perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan setelahnya, sebagai berikut:

- PSAK 116 “Sewa” : Amendemen tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik. Amendemen ini mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi jual dan sewa balik.
- PSAK 201 “Penyajian Laporan Keuangan” : Amendemen tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan. Amendemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PSAK berlaku untuk tahun buku yang mulai sejak 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan:

- PSAK 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” : Amendemen tentang kekurangan ketertukaran. Amendemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar serta pengungkapannya.

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rektor Universitas Terbuka (UT), Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., resmi dilantik sebagai Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Dengan dilantiknya Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. menjadi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), jabatan Rektor UT mengalami kekosongan. Oleh karena itu, berdasarkan surat Keputusan Majelis Wali Amanat UT Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 tanggal 15 Januari 2025, Universitas Terbuka melantik Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A. sebagai Rektor UT untuk meneruskan sisa masa jabatan periode 2021–2025.

28. TANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIVERSITAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan Universitas bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah diotorisasi untuk terbit oleh Pimpinan Universitas pada tanggal 20 Maret 2025.